

**Penilaian Rujukan Pasien Bersalin Peserta BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Berdasarkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Periode 1 Oktober-31 Desember 2014**

<sup>1</sup>Robby Ashar, <sup>2</sup>Hidayat Wijayanegara, <sup>3</sup>Nugraha Sutadipura  
<sup>1,2,3</sup>*Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Hariangbangga No.20 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>rasharsocmed@gmail.com*

**Abstract:** Parturient referral system for BPJS Kesehatan participants in Indonesia has been oriented to JKN system that is leveled in a several steps. The implementation of referrals that do not correspond to hierarchically step will tend to cause the accumulation of patients at one health care provider which impact on the quality of the health service. This study aims to assess the appropriateness of referral parturient at RSUP Dr. Hasan Sadikin Hospital as PPK3. Descriptive study was conducted at RSUP Dr. Hasan Sadikin Hospital at period October 1 - December 31, 2014. This study based on data from medical records of parturient patient who were participants of BPJS Kesehatan that were referred to RSUP Dr. Hasan Sadikin Hospital as PPK3. The result showed there were 498 of referred cases of BPJS Kesehatan participants. The referral that have been appropriate with the JKN system including 35 cases (7,03%), whereas as many as 320 cases (64.26%) were not appropriate with the JKN system because it was referred from PPK1 directly to PPK3 and 143 cases (28.71%) were not appropriate with the JKN system because it was referred from PPK2 to PPK3 but was not in accordance with health care provider competency. The conclusion that can be drawn from this research is parturient referral system of BPJS participants that referred to RSUP Dr. Hasan Sadikin Hospital many are not appropriate with the JKN system.

**Key Words:** BPJS Kesehatan Participants, JKN System, Parturient Patient, Referral System.

**Abstrak.** Sistem rujukan pasien bersalin peserta BPSJ Kesehatan di Indonesia sudah berkiblat pada sistem JKN yang bersifat berjenjang. Pelaksanaan rujukan yang tidak sesuai dengan alur jenjangnya akan cenderung menyebabkan penumpukkan pasien di salah satu pemberi pelayanan kesehatan yang berimbas pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian rujukan pasien bersalin di RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai PPK3. Penelitian secara deskriptif telah dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin periode 1 Oktober – 31 Desember 2014. Penelitian ini berdasarkan data rekam medis pasien bersalin yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUP Dr. Hasan Sadikin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 498 kasus rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan. Rujukan pasien bersalin yang sesuai dengan sistem JKN hanya 35 kasus (7.03%), sedangkan sebanyak 320 kasus (64,26%) belum sesuai sistem JKN karena dirujuk dari PPK1 langsung ke PPK3 dan 143 kasus (28.71%) belum sesuai dengan sistem JKN karena dirujuk dari PPK2 ke PPK3 tapi tidak sesuai dengan kompetensi tingkat pelayanannya. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke di RSUP Dr. Hasan Sadikin masih banyak yang belum sesuai dengan sistem JKN.

**Kata Kunci :** Pasien Bersalin, Peserta BPJS Kesehatan, Sistem JKN, Sistem Rujukan.

## **A. Pendahuluan**

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>1</sup> Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga lanjutan guna memenuhi upaya pemenuhan hak dasar rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Sistem

rujukan ini sudah diatur sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya penumpukan pasien di satu rumah sakit tertentu.<sup>2,3</sup>

Jenjang rujukan sudah dibagi menjadi beberapa bagian baik dalam kota maupun lintas kota.<sup>4</sup> Alur rujukan pasien diatur oleh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).<sup>5</sup> JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 Tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.<sup>2</sup> SJSN ini dilaksanakan oleh suatu badan resmi yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang telah ditetapkan beroperasi sejak 1 Januari 2014.<sup>5,6</sup> Setiap orang yang mengikuti sistem JKN ini maka akan disebut sebagai peserta BPJS Kesehatan.<sup>5</sup>

Jenjang rujukan dalam sistem JKN dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.<sup>5,7</sup> Pelayanan tingkat pertama ini dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Satu (PPK1) sedangkan pelayanan tingkat lanjutan ini meliputi Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (PPK2) dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga (PPK3).<sup>5</sup> Pada kasus pasien persalinan, PPK1 dapat memberikan pelayanan pertolongan persalinan normal tanpa penyulit berarti.<sup>1</sup> PPK2 dapat memberikan pelayanan pertolongan persalinan dengan penyulit yang hanya dapat diatasi oleh pelayanan kedokteran spesialis.<sup>1</sup> PPK3 dapat memberikan pelayanan pertolongan pasien partus yang memiliki penyulit yang komplikatif meliputi lebih dari satu sistem organ dan membutuhkan pelayanan subspecialistik yang intensif.<sup>1</sup> Ketidaksihinggaan pelaksanaan alur rujukan ini dapat mengakibatkan rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sehingga mudah terjadi penumpukan pasien di satu sumber pelayanan kesehatan, yang tersering adalah di PPK3.<sup>2</sup>

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin merupakan PPK3 yang menerima rujukan dari PPK 2.<sup>4</sup> Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) sesuai sistem JKN seharusnya tidak boleh menerima rujukan dari PPK1 secara langsung apabila kasus tersebut dapat ditangani oleh PPK2. PPK3 baru dapat menerima rujukan dari PPK1 secara langsung apabila terdapat indikasi kegawatdaruratan atau kasus penyakit tidak dapat ditangani oleh PPK2 baik karena tidak tersedianya peralatan canggih maupun tenaga ahli.<sup>5,8</sup> RSHS merupakan salah satu rumah sakit yang sering mengalami penumpukan pasien yang berasal dari berbagai daerah.<sup>3</sup> Banyak keluhan yang diutarakan oleh pihak RSHS karena tingginya kunjungan dan rujukan pasien yang seharusnya dapat ditangani di PPK1 atau PPK2.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian rujukan pasien bersalin di RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai PPK3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk masyarakat umum, praktisi medis, dan paramedis mengenai gambaran rujukan dan alur rujukan untuk pasien bersalin yang sesuai. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaksana pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat akan kesesuaian alur rujukan sehingga dapat meningkatkan system dan cakupan pelayanan kesehatan terhadap ibu bersalin.

## **B. Metode dan Bahan**

Penelitian kuantitatif secara deskriptif dengan metode *cross sectional* telah dilakukan di RSUP Dr. Hasan Sadikin periode 1 Oktober – 31 Desember 2014.

Penelitian ini berdasarkan data rekam medis pasien bersalin yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUP Dr. Hasan Sadikin. Variabel penelitian ini adalah pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam periode 1 Oktober - 31 Desember 2014. Pengambilan periode di akhir tahun bertujuan untuk menghindari bias karena pelaksanaan sistem JKN masih dinilai belum berjalan dengan baik. Populasi target adalah pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke PPK3. Populasi terjangkau yang telah memenuhi kriteria penelitian sebanyak 498 kasus pasien rujukan.

### C. Hasil

Data yang telah sesuai dengan kriteria penelitian yaitu sebesar 498 kasus rujukan bersalin telah dikelompokkan menjadi tiga kelompok penelitian. Yaitu kasus-kasus kelompok A yang merupakan kasus-kasus rujukan langsung dari PPK 1 menuju PPK 3 dimana rujukan ini tidak sesuai dengan Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena berasal dari dokter praktek pribadi, klinik kesehatan, puskesmas, rumah bersalin, dan praktek bidan.<sup>1</sup>

**Tabel 1** Gambaran Rujukan dari PPK 1 langsung ke PPK3/RSUP Dr. Hasan Sadikin (Kelompok A)

KELOMPOK A / ASAL Perujukan	Jumlah
Praktek Dokter/klinik	60
Puskesmas	78
Praktek Bidan	120
Rumah Bersalin	14
tanpa surat rujukan resmi / dll	48
TOTAL	320

Kelompok B adalah kelompok kasus-kasus yang melakukan rujukan dari PPK 2 ke PPK 3 tetapi perujukan ini tidak sesuai dengan Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa.<sup>1</sup>

**Tabel 2** Gambaran rujukan Dari PPK2 ke PPK3/RSUP Dr. Hasan Sadikin Yang Tidak Sesuai Dengan Tingkat Pelayanannya (Kelompok B)

KELOMPOK B / STRATIFIKASI KASUS	JUMLAH
Partus memanjang	42

Premature contraction	16
KPD	27
PEB/PER/Hipertensi	18
Placenta Previa / Solutio / Perdarahan antepartum	5
Post SC/post Vacum / post trauma	9
Gangguan letak / Posisi / Bayi Besar / CPD / Kembar	14
IUFD / Gawat Janin	7
Oligohydramnion / IUGR	5
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>

Kelompok C adalah kelompok kasus-kasus yang melakukan rujukan dari PPK 2 ke PPK 3 yang sesuai dengan Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa.<sup>1</sup>

**Tabel 3 — Gambaran Rujukan Dari PPK2 ke PPK3/RSUP Dr. Hasan Sadikin yang Sesuai Dengan Tingkat Pelayanannya (Kelompok C)**

KELOMPOK C / STRATIFIKASI KASUS	JUMLAH
Lebih penyulit disertai ancaman	8
Komplikasi sistemik / HIV / DM / dll	5
Gangguan Jantung / Paru	11
Gangguan GI Tract (Hepatitis,dll)	2
Eclampsy / HELLP Syndrome	8
Obs Tumor / Ca	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

Proporsi yang sesuai dengan sistem JKN yaitu yang dirujuk dari PPK2 ke PPK3 yang sesuai dengan tingkat pelayanannya mencapai 7.03 %. Sedangkan proporsi yang tidak sesuai dengan sistem JKN yaitu mencapai 92.97%.

**Tabel 4 — Penilaian Rujukan Pasien Bersalin Peserta BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin**

PenilaianRujukan Pasien Bersalin Peserta BPJS Kesehatan

Periode 1 Oktober 2014 – 31 Desember 2014

Kategori	Jumlah	Persentase
Kelompok A	320 kasus	64.26%
Kelompok B	143 kasus	28.71%
Kelompok C	35 kasus	7.03%
Total	498 Kasus	100%

Penilaian Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan

**Proporsi yang sesuai dengan sistem JKN : 7.03 %**

**Proporsi yang tidak sesuai dengan sistem JKN**

**64.26% + 28.71%**

**: 92.97%**

#### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok A mencapai 320 kasus (64,26%), kelompok B mencapai 148 kasus (28.71%), dan kelompok C mencapai 30 kasus (7.03%). Angka persentase rujukan ini dapat menunjukkan bahwa proses rujukan pasien bersalin ke RSUP Dr. Hasan Sadikin belum berjalan sempurna sesuai alurnya dan tingkat kewenangan pelayanannya.

Apabila kita menilainya berdasarkan kesesuaian alurnya saja yaitu alur rujukan dari PPK 1 ke PPK2 dan dari PPK2 ke PPK3, maka dapat kita nilai ketepatan alurnya adalah 178 kasus (35.74%) yang sesuai dari PPK 2 ke PPK3, sedangkan 320 kasus (64.26%) lainnya tidak sesuai alurnya karena dirujuk dari PPK1 langsung ke PPK3. Sedangkan apabila kita menilai alur rujukan sesuai tingkat wewenang pelayanannya berdasarkan Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka dapat kita nilai yang sesuai pelayanannya hanya 35 kasus (7.03%) dan sisanya 463 kasus (92.97%) masih belum sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin masih banyak yang belum sesuai dengan sistem JKN.<sup>1</sup>

#### E. Kesimpulan

Rujukan dari PPK1 ke PPK3 langsung mencapai 320 kasus (64,26%), rujukan pasien dari PPK2 ke PPK3 yang tidak sesuai sistem JKN mencapai 143 kasus (28.71%), dan rujukan dari PPK2 ke PPK3 yang sesuai sistem JKN mencapai 35 kasus (7.03%). dapat kita nilai yang sesuai pelayanannya hanya 35 kasus (7.03%) dan sisanya 463 kasus (92.97%) masih belum sesuai.

Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa rujukan pasien bersalin peserta BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin masih banyak yang belum sesuai dengan sistem JKN.<sup>1</sup>

## Daftar Pustaka

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2012. *Pedoman Standar Pengelolaan Penyakit Berdasarkan Kewenangan Tingkat Pelayanan Kesehatan*. Jawa Barat

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta

Gubernur Jawa Barat. 2011. *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat*

BPJS Kesehatan. 2014. *Manual Pelaksanaan JKN - BPJS Kesehatan*. Jakarta

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Sistem Rujukan Terstruktur dan Berjenjang Dalam Rangka Menyongsong Jaminan Kesehatan Nasional*

### Sumber Lain :

Edukia-WHO Country Office for Indonesia, 2013, <http://www.edukia.org/web/kbibu/2-1-3-sistem-dan-cara-rujukan/>

RSHS: Jangan Asal Tunjuk Hidun, Susanti R,  
<http://m.inilah.com/news/detail/2083484/rshs-jangana-asal-tunjuk-hidung>, 2014